

Mambangun Kesadaran Politik: Peran Kepala Kampung di Kampung Sorabi, Mamberamo Raya

Elimelek Stefanus Samakori¹, Ricky Engel Mawara^{2*}

^{1,2} Prodi PPKn, FKIP, Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Indonesia.

*Email: ricky.mawara@yahoo.co.id

Diterima: 10 Juni 2026 – Disetujui: 17 Juni 2026

© 2026 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Cenderawasih

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa Sorabi, Membramo Raya dalam membangun kesadaran politik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa telah menjalankan perannya sesuai dengan posisinya. Sebagai motivator, kepala desa mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pendidikan politik, serta berupaya mengubah perilaku untuk meningkatkan kerja sama dan kualitas hidup. Dalam perannya sebagai mediator, ia berhasil menyelesaikan konflik dan memfasilitasi komunikasi antar warga. Sebagai fasilitator, kepala desa mendukung pembangunan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, sedangkan sebagai penggerak, ia memobilisasi sumber daya manusia dan material, serta memberi contoh dalam kerja sama antar kelompok atau lembaga di desa.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Kepala Desa, Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengubah perilaku individu sekaligus membentuk karakter bangsa (Jamal et al., 2024; Mawara, 2023). Menurut John Dewey dalam bukunya "*Democracy and Education*" (1916), pendidikan adalah proses yang berkelanjutan dari pertumbuhan, bukan hanya persiapan untuk kehidupan di masa depan. Ilmu politik, seperti yang dijelaskan oleh Harold Lasswell dalam "*Politics: Who Gets What, When, How*" (1936) merupakan studi tentang distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat, serta bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi individu maupun kelompok.

Pendidikan politik sangat penting bagi suatu negara karena membantu membangun dasar bagi demokrasi yang kuat dan berkelanjutan (Lawani et al., 2023; Putri et al., 2023; Ulfiyyati et al., 2023). Pendidikan ini membantu warga negara memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban mereka, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu politik dan sosial, dan memfasilitasi pengembangan kepemimpinan yang etis dan efektif (Mawara, 2025). Selain itu, pendidikan politik mendorong analisis kritis dan pemikiran independen yang penting untuk inovasi serta pemecahan masalah dalam

masyarakat yang demokratis, atau dengan kata lain pendidikan politik bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang cara menjalankan pemerintahan yang efektif dan adil. Seperti yang diungkapkan oleh Amy Gutmann dalam "*Democratic Education*" (1987), pendidikan politik harus mempersiapkan warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam demokrasi, memahami hak dan kewajiban mereka, serta mengembangkan kemampuan mereka untuk berpikir kritis tentang masalah politik.

Inilah yang melandasari jika pendidikan politik sudah selayaknya benar-benar diajarkan dari bagian paling dasar, yakni di kampung atau desa-desa yang ada di seluruh Indonesia. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengarahkan pembangunan desa melalui dua pendekatan, yaitu "Desa Membangun" dan "Membangun Desa," yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup, serta mengurangi kemiskinan. Hal ini dicapai melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan infrastruktur, peningkatan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Proses pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat (Hidayat & Yani, 2022; Iskandar, 2020).

Kemajuan suatu negara bergantung pada partisipasi aktif dan kesadaran politik warganya (Oktavia, 2023; Zahro et al., 2023). Pendidikan politik di tingkat desa, sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, berperan krusial dalam membentuk warga negara yang demokratis, partisipatif, dan bertanggung jawab (Lawani et al., 2023; Lubis, 2023; Pratama et al., 2024). Dengan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, serta proses pengambilan keputusan publik, masyarakat desa dapat berperan aktif dalam pembangunan daerahnya, mengawasi jalannya pemerintahan, dan mendorong terciptanya kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Partisipasi yang efektif ini pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan peningkatan kualitas hidup di tingkat nasional. Karena itu, investasi dalam pendidikan politik di desa bukan hanya sekadar upaya pembangunan lokal, melainkan juga merupakan investasi strategis untuk kemajuan bangsa secara keseluruhan.

Manfaat pendidikan politik sangat penting dalam konteks masyarakat, karena membantu membentuk warga negara yang tidak hanya menyadari hak dan kewajibannya, juga peduli terhadap kesejahteraan bersama. Seperti yang diungkapkan oleh Benjamin Barber dalam "*Strong Democracy*" (1984), pendidikan politik memainkan peran krusial dalam mengembangkan partisipasi publik yang aktif, yang merupakan tulang punggung dari demokrasi yang sehat.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik tidak hanya mengajarkan tentang struktur dan fungsi pemerintah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi dan kepemimpinan, terutama bagi generasi muda. Hal ini sesuai dengan pandangan Robert Dahl dalam "*On Democracy*" (1998), yang menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk pemimpin masa depan yang memahami dan menghargai prinsip-prinsip demokrasi (Rista et al., 2024).

Kurangnya pemahaman tentang pendidikan politik sering kali menyebabkan apatisme dan

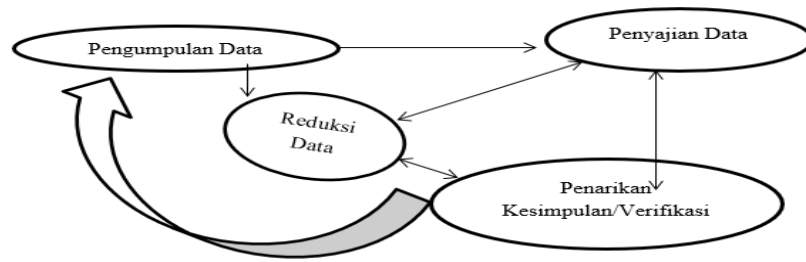
kurangnya partisipasi dalam proses politik (Sari & Bramantyo, 2024; Dewi et al., 2022), seperti yang diamati oleh David Easton dalam "*A Framework for Political Analysis*" (1965). Karena itu, penting bagi masyarakat untuk mendukung implementasi pendidikan politik yang efektif agar dapat menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi, bertanggung jawab, dan aktif secara politik.

Melalui pendidikan politik yang efektif, masalah-masalah seperti apatisme politik, korupsi, dan pengambilan keputusan yang kurang informasi dapat ditangani lebih efektif. Pendidikan ini juga berperan dalam pembaharuan ilmu pengetahuan politik dengan memperkenalkan perspektif baru dan metodologi penelitian yang inovatif, yang dapat memperdalam pemahaman tentang dinamika kekuasaan dan pemerintahan. Karena peningkatan kualitas dan jangkauan pendidikan politik di suatu negara akan secara positif mempengaruhi tingkat partisipasi warga dalam proses demokratis dan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Pendidikan politik tidak hanya penting untuk keberlangsungan demokrasi, tetapi juga untuk kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara.

Landasan teori terkait peran kepala desa berdasarkan Hermansyah (2015) yakni peran kepala desa dalam pembangunan desa bersifat integratif, meliputi peran sebagai motivator, mediator, fasilitator, dan mobilisator. Peran sebagai motivator mendorong partisipasi warga dalam proses pembangunan, yang memerlukan pemahaman politik dasar tentang hak dan kewajiban warga negara serta mekanisme pengambilan keputusan. Peran sebagai mediator membutuhkan keahlian dalam menyelesaikan konflik secara damai dan demokratis, yang didasari oleh pemahaman akan nilai-nilai demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai fasilitator, kepala desa memfasilitasi akses informasi dan partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, yang merupakan bagian integral dari pendidikan politik. Terakhir, peran sebagai mobilisator melibatkan pengorganisasian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, yang memerlukan kesadaran politik dan pemahaman akan pentingnya peran warga negara dalam menentukan arah pembangunan daerahnya. Dengan demikian, efektifitas keempat peran kepala desa tersebut bergantung pada tingkat pendidikan politik masyarakat dan kemampuan kepala desa untuk memfasilitasi pemahaman tersebut.

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang merupakan penelitian yang berorientasi pada eksplorasi mendalam dan analisis kritis terhadap fenomena sosial, meliputi sikap, kepercayaan, persepsi, serta perilaku individu dan kelompok. Lokasi penelitian berada di kampung Sorabi distrik Sawai kabupaten Mamberamo Raya. Data diperoleh melalui wawancara mendalam pada pimpinan kampung beserta para jajarannya, serta empat orang masyarakat. Selain itu, dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan pendidikan politik. Teknis analisis data menggunakan analisis data Miles and Huberman (2007:20) dengan tiga tahap, yakni pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.



Gambar. 1. Model Interaktif Miles dan Haberman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dirangkum menunjukkan bahwa peran kepala desa telah dilakukan sebagaimana mestinya:

1. Sebagai Motivator

Kepala desa berupaya untuk mendorong dan mengambil tindakan strategis yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat, sehingga tercipta kerja sama yang solid demi kemajuan kampung dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Dalam perannya sebagai motivator, kepala desa memainkan peran penting dalam pendidikan politik dengan menyediakan wadah dan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan desa. Seperti yang dikatakan kepala kampung Sorabi bahwa saya berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah strategis yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat. Hal ini saya lakukan untuk memastikan adanya kerja sama yang efektif antara warga demi kemajuan kampung kami dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai motivator, kepala desa tidak hanya bertugas menggerakkan masyarakat secara fisik dalam pembangunan infrastruktur atau kegiatan ekonomi, tetapi juga menginspirasi warga untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mencakup mengedukasi warga tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum, pertemuan komunitas, dan inisiatif lokal lainnya. Kepala desa harus mampu mengkomunikasikan visi pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam merumuskan dan merealisasikan visi tersebut.

2. Sebagai Mediator

Peran kepala desa sebagai mediator sangat penting dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Sebagai mediator, kepala desa bertindak sebagai pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama melalui dialog dan negosiasi. Dalam kapasitas ini, kepala desa memfasilitasi komunikasi antar warga, mengarahkan diskusi untuk mencari solusi yang adil, dan mendukung pencapaian mufakat yang memuaskan semua pihak, sehingga memperkuat tali persaudaraan dan stabilitas sosial di desa.

Hal tersebutlah yang dilakukan kepala kampung, beliau mengemukakan bahwa sebagai kepala kampung, saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di masyarakat demi menjaga keamanan dan ketertiban. Karena itu, saya selalu berusaha beradaptasi dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Saya juga mengajak warga untuk selalu hidup dalam damai, saling menolong, dan membantu satu sama lain, sehingga tercipta suasana kekeluargaan yang kuat. Ini penting untuk mencegah konflik dan masalah yang tidak diinginkan. Itulah upaya yang saya lakukan untuk memastikan kampung kita tetap harmonis dan aman.

3. Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, kepala desa memainkan peran penting dalam mendukung dan memperlancar proses pembangunan dan kegiatan sosial di desa. Dalam peran ini, kepala desa bertugas menyediakan sumber daya, informasi, dan bantuan teknis yang diperlukan oleh masyarakat untuk melaksanakan berbagai inisiatif. Kepala desa juga memfasilitasi pertemuan dan diskusi antar warga, mengorganisir pelatihan, serta membantu dalam perencanaan dan implementasi proyek-proyek pembangunan. Melalui peran ini, kepala desa membantu memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa.

Seperti yang diungkapkan kepala kampung bahwa sebagai kepala kampung, saya memiliki tanggung jawab untuk mengadakan pertemuan dan pembinaan secara berkala dengan masyarakat Kampung Sorabi. Tujuannya adalah untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya pendidikan politik, yang kami percayai dapat merubah karakter dan perilaku warga. Selain itu, melalui pendidikan politik, kami berusaha menciptakan pola hidup yang lebih baik untuk seluruh masyarakat di Kampung Sorabi.

4. Sebagai Mobilisator

Kepala desa bertindak sebagai penggerak utama dalam memotivasi dan mengorganisir masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Peran ini melibatkan penggalangan sumber daya, baik manusia maupun material, untuk mendukung berbagai inisiatif pembangunan. Kepala desa mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi yang ada dalam komunitas, merangsang semangat gotong royong, dan memimpin dengan contoh dalam pelaksanaan proyek-proyek.

Kepala desa juga berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan antar kelompok atau lembaga di desa, memastikan bahwa semua pihak bekerja secara sinergis menuju tujuan yang sama. Dengan demikian, kepala desa memastikan bahwa pembangunan berjalan efektif dan efisien, mewujudkan visi pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Kepala kampung mengemukakan bahwa saya selalu berkomitmen untuk menjalin kerja sama yang erat dengan perangkat kampung dan masyarakat karena ini sangat penting untuk kemajuan kampung kami. Kami melakukan komunikasi yang efektif dengan semua pihak, mengajak mereka untuk bersatu dalam setiap pekerjaan dan proyek pembangunan yang kami laksanakan. Selain itu, saya berusaha untuk menjadi saluran komunikasi yang baik, menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi

masyarakat dalam setiap kebijakan yang kami buat.

Dalam menjalankan pemerintahan desa, kami bertanggung jawab atas berbagai fungsi seperti pengelolaan administrasi pemerintahan, penetapan peraturan desa, dan pembinaan dalam masalah pertahanan serta ketentraman dan ketertiban. Kami juga berupaya melindungi masyarakat, mengelola administrasi kependudukan, serta menata dan mengelola wilayah dengan baik.

Dalam aspek pembangunan, kami fokus pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa, serta memajukan bidang pendidikan dan kesehatan. Kami juga melakukan pembinaan kemasyarakatan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, sosial budaya, keagamaan, dan tenaga kerja.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu prioritas kami. Kami melaksanakan sosialisasi dan motivasi di bidang budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup. Kami juga mendukung pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan Karang Taruna, serta menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Namun dalam pelaksanaannya, kepala kampung juga mengalami beberapa kendala yang menghambat kegiatan yang dia serta jajarannya lakukan, antara lain:

1. Salah satu kendala yang dihadapi dalam memotivasi masyarakat Kampung Sorabi terhadap peranan pendidikan politik adalah waktu yang diperlukan untuk memahami konsep politik. Meskipun membutuhkan waktu yang lama, saya telah berusaha memberikan pembinaan dan sosialisasi, yang akhirnya membuat sebagian besar masyarakat mulai memahami politik.
2. Kendala lain adalah belum adanya kantor desa atau balai kampung, yang mempengaruhi kelancaran kegiatan pembangunan dan politik di kampung. Sementara ini, kami menggunakan ruang kelas di sekolah dasar untuk pertemuan, namun pembangunan kantor desa sudah hampir selesai dan akan segera kami gunakan.
3. Kami juga menghadapi kekurangan tenaga pendidik, yang berdampak pada pendidikan anak-anak kami. Saya dan masyarakat telah mengajukan proposal kepada Bupati untuk mendapatkan tenaga pendidik dan bantuan rumah guru. Meskipun demikian, kami telah berhasil membangun dua unit rumah guru dengan dana dari kampung.
4. Selain itu, kurangnya fasilitas kesehatan dan tenaga medis juga menjadi kendala, mempengaruhi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Meskipun kami belum memiliki puskesmas dan tenaga kesehatan yang memadai, kami tidak pernah kehilangan semangat untuk terus berusaha mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
5. Masalah jabatan kepala kampung juga sering menimbulkan konflik antar warga, yang berpengaruh pada kekompakan dan kerja sama di kampung. Untuk mengatasi ini, saya telah mengundang pihak dari kabupaten dan distrik untuk memberikan sosialisasi dan pembinaan, agar masyarakat tidak salah paham dan dapat menghindari konflik.

KESIMPULAN DAN SARAN:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa telah berperan secara efektif sebagai

motivator, mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan dan pendidikan politik, serta berusaha mengubah perilaku masyarakat untuk mencapai kerja sama yang lebih baik dan kualitas hidup yang meningkat. Sebagai mediator, kepala desa telah berhasil memediasi konflik dan memfasilitasi komunikasi yang konstruktif antar warga. Dalam perannya sebagai fasilitator, kepala desa telah mendukung dan memperlancar proses pembangunan dan kegiatan sosial, serta menyediakan sumber daya yang diperlukan. Sebagai mobilisator, kepala desa telah menggerakkan sumber daya manusia dan material, memimpin dengan contoh, dan memastikan kerja sama antar kelompok atau lembaga di desa.

Namun, terdapat kendala seperti waktu yang lama untuk memahami konsep politik, kurangnya infrastruktur dan tenaga pendidik, serta masalah kesehatan dan konflik jabatan yang menghambat proses tersebut. Untuk mengatasi ini, disarankan peningkatan kapasitas melalui pelatihan, mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah yang lebih tinggi, menggunakan teknologi informasi, menerapkan pendekatan partisipatif, mengembangkan program pemberdayaan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Dengan strategi ini, diharapkan kepala desa dapat lebih efektif dalam mengatasi kendala dan membawa kemajuan yang berkelanjutan untuk Kampung Sorabi.

DAFTAR PUSTAKA

- Barber, B. R. (1984). *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Dahl, R. A. (1998). *On Democracy*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education*. New York, NY: Macmillan.
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). *Analisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam partisipasi politik masyarakat di pilkada serta meminimalisir golput*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 8(1).
- Easton, D. (1965). *A Framework for Political Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Gutmann, A. (1987). *Democratic Education*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hermansyah. (2015). *Peran Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Kecamatan Tama Lia Kab. Tana Tidung (Studi Kasus Di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan)*. Ejournal Pemerintahan Integratif, 3(2), 351-362.
- Hidayat, A., & Yani, S. Z. F. (2022). *Peran Administrasi Pembangunan Desa*. Jurnal Inovasi Penelitian, 3(7), 7091-7100.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jamal, O., Engel Mawara, R., A. L. Rahail, J. (2024). "Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Belajar Mahasiswa Asli Papua Program Studi PPKn". Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial, 11(3), pp. 314–327. doi: 10.31571/sosial.v11i3.8210.

- Lasswell, H. D. (1936). *Politics: Who Gets What, When, How*. New York. NY: Whittlesey House.
- Lawani, U. S., Ismail, R., & Lukoting, F. (2023). *Pendidikan Politik Dalam Membangun Kesadaran Demokrasi Pemilih Pemula Jelang Pemilu 2024*. Jurnal Polahi, 1(1).
- Lawani, U. S., Ismail, R., & Lukoting, F. (2023). *Pendidikan Politik Dalam Membangun Kesadaran Demokrasi Pemilih Pemula Jelang Pemilu 2024*. Jurnal Polahi, 1(1).
- Lubis, M. A. A. (2023). *Peran Pendidikan Politik dalam Pembentukan Warga Negara yang Berbudaya Demokratis*. literacy notes. 1(2).
- Mawara, R. E. (2023). *Dampak penggunaan aplikasi TikTok terhadap perubahan perilaku sosial mahasiswa Prodi PPKN*. Phinisi Integration Review. 6(2). 344-349.
- Oktaviana, D. A. (2023). *Partisipasi politik siswa dalam membangun generasi yang peduli dengan demokrasi*. Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan. 13(2), 94-102.
- Pratama, I. N., Hadi, A., & Umami, R. (2024). *Penguatan Partisipasi Politik Inklusif Dalam Meningkatkan Pemahaman Dan Keterlibatan Generasi Z Pada Pemilu 2024 Di Desa Bagik Polak*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa. 1(11). 2986-2993.
- Putri, M. F. J. L., Putriani, F., Santika, H., Mudhoffar, K. N., & Putri, N. G. A. (2023). *Peran pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah*. Jurnal Kewarganegaraan. 7(2). 1983-1988.
- Rista, D., & Wiranata, I. H. (2024, August). *Pendidikan Kewarganegaraan: Landasan Demokrasi yang Inklusif Melalui Pemberdayaan Warga Negara menuju Masyarakat yang Demokratis*. In Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran) (Vol. 7, pp. 1216-1227).
- Sari, A. G., & Bramantyo, R. Y. (2024). *Peningkatan Minat Politik Remaja Pemilih Awal Pasca Pemilu Presiden Republik Indonesia 2024*. Transparansi Hukum. 7(2). 103-116.
- Ulfiyyati, A., Muhamad, R., & Akbari, I. S. (2023). *Demokrasi: tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan prospek masa depan*. Advances In Social Humanities Research. 1(4). 435-444.
- Zahro, S., Kamilah, M. N., Ardiansyah, M., Safitri, I. M., Naharina, P. S., & Waraswati, A. N. (2023). *Kesadaran Berpolitik Di Indonesia*. JOCER: Journal of Civic Education Research. 1(2). 49-64.